

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah)**

NASKAH PUBLIKASI



Disusun oleh:

DESY ANZARSARI

B 200 100 169

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2014

HALAMAN PENGESAHAN

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul:

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota
Se-Jawa Tengah).**

Yang ditulis oleh :

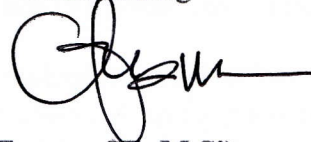
DESY ANZARSARI

B 200 100 169

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta, November 2014

Pembimbing



(Fauzan SE, M.Si)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Dr. Triyono, SE, M.Si)

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH TERHADAP
KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota
Se-Jawa Tengah).**

DESY ANZARSARI

B 200 100 169

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

E-mail: desyanzar@gmail.com

ABSTRACT

This study, entitled "The Influence of Regional Government Characteristics to The Regional Government Occupation (empirical studies on the District / City in Central Java)". The purpose is to determine how much influence the characteristics of the local government to local government performance.

This study examined the Financial Statements of the Government of the region by taking a sample of 35 districts / municipalities in Central Java. The data used in this research is secondary data.

The analytical tool used in this study is multipleregression. From the analysis it can be concluded that the results of the classical assumption is not found in the test problems multicollinearity, heteroscedasticity test, autocorrelation test model (Durbin-Watson) and normal distribution normality test. Based on t-test analysis known government size (size) does not affect the performance of penerintah area. While prosperity (wealth), legislative and revenue Intergovernmental affect the financial performance of local governments.

Keywords: *Performance, Characteristics, local government size (size), prosperity (wealth), size of the Legislature, Intergovernmental revenue*

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (studi empiris pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah)”. Adapun tujuannya untuk mengetahui seberapa besar pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini meneliti Laporan Keuangan Pemerintah daerah dengan mengambil sampel 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Alatanalisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda.

Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa dari hasil uji asumsi klasik tidak ditemukan masalah dalam uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, sedangkan uji autokorelasi dengan model (Durbin-watson) terdapat autokorelasi dan uji normalitas berdistribusi normal. Berdasarkan analisis uji-t diketahui ukuran pemda (*size*) dan ukuran legislatif tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan kemakmuran (*wealth*), dan *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.

Kata Kunci : ***Kinerja, Karakteristik, Ukuran Pemda (size), Kemakmuran (wealth), Ukuran Legislatif, Intergovernmental revenue***

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengukuran kinerja merupakan komponen yang penting karena akan memberikan umpan balik atas rencana yang telah diimplementasikan (Chow, Ganulin, Haddad, dan Wiliamson, 1998). Wood (1998) mengungkapkan bahwa fungsi dari pengukuran kinerja dapat menjelaskan mengenai (1) Evaluasi bagaimana program tersebut berjalan; (2) Sarana perbandingan atas pelayanan yang diberikan; (3) Alat komunikasi dengan publik. Selain itu, tuntutan pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dilakukan karena adanya fakta bahwa masih buruknya kinerja pemerintah daerah di Indonesia yang dapat terlihat dengan adanya pernyataan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI), Anwar Nasution (Antaraneews.com, 2007), bahwa masih buruknya transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah sehingga hal tersebut berdampak pada buruknya penilaian kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengukuran kinerja keuangan daerah adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan.

Penelitian mengenai karakteristik daerah telah dilakukan oleh Patrick (2007) yang diterapkan pada pemerintah daerah Pennsylvania. Penelitian yang dilakukan Patrick (2007) menggunakan karakteristik pemerintah daerah sebagai variabel independen. Karakteristik tersebut terdiri dari (a) budaya organisasi; (b) struktur organisasi; dan (c) lingkungan eksternal. Penelitian yang telah dilakukan oleh Suhardjanto, Rusmin, Mandasari, dan Brown (2010) meneliti tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah terhadap pengungkapan wajib yang sesuai dengan SAP, dimana dalam menjelaskan karakteristik daerah menggunakan model yang sama dengan Patrick (2007). Penelitian yang dilakukan Suhardjanto et al. (2010) menggunakan struktur organisasi dan lingkungan eksternal dalam menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dimana struktur organisasi diproksikan dengan *size* daerah, *wealth*, *functional differentiation*, *age*, dan latar belakang pendidikan kepala daerah sedangkan lingkungan eksternal diproksikan dengan *municipality debt financing* dan *intergovernmental*

revenue. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota Se-Jawa Tengah)”**.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Mengetahui seberapa besar ukuran pemerintah daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
2. Mengetahui seberapa besar kemakmuran berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
3. Mengetahui seberapa besar ukuran legislatif berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah.
4. Mengetahui seberapa besar *intergovernmental revenue* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Kinerja Pemerintah Daerah

Bastian (2006) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi (Hamzah, 2008). Penelitian yang dilakukan Azhar (2008) mengungkapkan bahwa kinerja diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) adalah proses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan (Westin, 1998).

2. Karakteristik Pemerintah Daerah

Karakteristik berarti mempunyai sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu. Lesmana (2010) mengatakan bahwa karakteristik

Pemerintah Daerah berarti sifat khas dari otoritas administratif Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Elemen-elemen yang terdapat dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah dapat menggambarkan karakteristik Pemerintah Daerah. Laporan keuangan merupakan suatu alat yang memfasilitasi transparansi akuntabilitas publik, yang menyediakan informasi yang relevan mengenai kegiatan operasionalnya, posisi keuangan, arus kas, dan penjelasan atas pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan tersebut.

3. Ukuran (*Size*) Pemerintah Daerah

Size adalah suatu nominal yang dapat mendiskripsikan sesuatu. Sebagai informasi bahwa *size* perusahaan yang diukur dengan menggunakan total aktiva akan lebih baik karena nilai aktiva relatif stabil dibandingkan dengan nilai penjualan dan kapitalisasi pasar dalam mengukur *size* perusahaan (Nasser, 2009).

4. Kemakmuran (*Wealth*) Pemerintah Daerah

Kemakmuran adalah kemampuan dalam mencukupi kebutuhan. Kemakmuran suatu negara dapat diukur dengan berbagai macam ukuran yang tidak selalu sama karena setiap orang memiliki pandangan hidup yang berbeda sehingga tolak ukur dari kesejahteraan juga akan berbeda.

5. Ukuran Legislatif

Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) atau anggota legislatif bertugas mengawasi pemerintah daerah agar pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang ada untuk dapat didayagunakan dengan baik. Banyaknya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap pemerintah daerah sehingga berdampak dengan adanya peningkatan kinerja pemerintah daerah (Sumarjo, 2010).

6. *Intergovernmental Revenue*

Patrick (2007) mendefinisikan *intergovernmental revenue* adalah jenis pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari transfer pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi Pemerintah Daerah.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pengujian hipotesis (*hypothesis testing*) yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang diajukan oleh peneliti mengenai pengaruh karakteristik pemerintah daerah yang diukur dengan ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), ukuran legislatif, dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Sekaran (2000), pengujian hipotesis harus dapat menjelaskan sifat dari hubungan tertentu, memahami perbedaan antar kelompok atau independensi dua variable atau lebih.

B. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh dari pihak lain (Sekaran, 2006). Alasan penggunaan data sekunder dengan pertimbangan bahwa data ini mempunyai validitas data yang dijamin oleh pihak lain sehingga handal untuk digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota serta data non keuangan, seperti jumlah anggota DPRD. Metode pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan yang kemudian dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Data LKPD yang dikumpulkan diperoleh dari situs resmi Provinsi Jawa Tengah melalui www.djpk.kemenkeu.go.id, sedangkan data non keuangan diperoleh dari website resmi masing-masing pemerintah daerah.

C. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan permasalahan yang diteliti. Objek dari penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota se-Jawa Tengah tahun anggaran 2013.

D. Definisi Operasional

Sekaran (2006) menyatakan bahwa variabel merupakan sesuatu yang mempunyai nilai yang dapat berbeda/berubah. Nilai ini dapat berbeda dalam waktu yang lain untuk objek/orang yang sama atau dapat juga berbeda pada waktu yang sama untuk orang/objek yang berbeda.

Variabel Independen

Variabel independen merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi variabel dependen, baik pengaruh secara positif maupun negatif (Sekaran, 2006). Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah, ukuran legislatif, dan *intergovernmental revenue*.

Ukuran Pemerintah Daerah (*size*)

Size dapat di ukur dengan jumlah karyawan, total aset, total pendapatan, dan tingkat produktifitas (Damanpour, 1991).peneliti inimengunakan total aset sebagai proksi untuk mengukur ukuran Pemerintah Daerah.

Kemakmuran (*Wealth*) Pemerintah Daerah

Menurut Abdullah (2004), kemakmuran (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pertimbangan pengukuran kemakmuran dengan PAD ini karena meskipun kecilnya kontribusi PAD terhadap pemerintah daerah di Indonesia (sekitar 1% -16%), PAD merupakan satu-satunya sumber keuangan yang berasal dari wilayah tersebut (Suhardjanto et al., 2010). Selain itu, dari semua jenis pendapatan (PAD, pendapatan antar pemerintah, dan pendapatan hukum lainnya) hanya PAD tersedia dalam SKPD (Rosdini, 2008).

Ukuran Legislatif

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab kepada pemerintah pusat atas kinerja keuangannya. Pada era otonomi ini, peranan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD merupakan sesuatu yang sangat penting (Winarna dan

Murni, 2007). Penelitian yang dilakukan Gilligan dan Matsusaka (2001) menggunakan jumlah total anggota DPRD dalam mengukur ukuran legislatif.

Intergovernmental revenue

Intergovernmental revenue merupakan bagian dari pendapatan yang berasal dari lingkungan eksternal dan besarnya ketergantungan Pemerintah Daerah dari transfer pemerintah pusat (Sumarjo, 2010). Penelitian Patrick (2007) menghitung *intergovernmental revenue* dengan membagi total *intergovernmental revenue* dengan total pendapatan dalam setahun.

Variabel Dependen

Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan, visi dan misi suatu organisasi (Bastian, 2006). Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Moore, 2003). Penilaian efisiensi sangat penting dilakukan karena akan berdampak pada standar hidup masyarakat (Lorenzo dan Sanchez, 2007). Penghitungan rasio efisiensi didasarkan pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hamzah (2009), yaitu:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran}}{\text{Realisasi Penerimaan}}$$

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi berganda yang sebelumnya harus terbebas dari pengujian asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi).

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, dan sum (Ghozali, 2006).

2. Pengujian Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi yang mengansumsikan bahwa setiap residual didistribusikan secara normal atau tidak. Pengujian ini dilakukan dengan uji *kolmogorov-smirnov* dengan melihat nilai $\text{asyp.sig} > 0,05$.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan pengujian untuk menentukan apakah pada model regresi ditemukan adanya masalah di antara variabel independen. Batas dari *tolerance value* adalah 0,10 dan batas *VIF* adalah 10. Apabila hasil analisis menunjukkan hasil *VIF* di bawah nilai 10 dan *tolerance value* di atas 0,10, maka tidak terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2006).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan *Uji Durbin-Watson (DW test)* dengan cara melihat nilai DW yang harus memenuhi syarat $dU < DW < 4-dU$, jika syarat telah terpenuhi maka data terbebas dari autokorelasi, dimana nilai dU dapat diperoleh dari tabel *Durbin-Watson*.

d. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari tabel *coefficients* apabila probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

3. Pengujian Hipotesis.

a. Analisis Regresi Linier Berganda

Adapun dari analisis linier berganda dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut:

$$KNJ = \beta_1 \text{ SIZE} + \beta_2 \text{ WLTH} + \beta_3 \text{ DPRD} + \beta_4 \text{ IR}$$

b. Pengujian Hipotesis

1) Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi untuk mengetahui seberapa besar varian dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen.

2) Uji Signifikansi Simultan (F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat).

3) Uji t

Distribusi t untuk menguji suatu hipotesis. Jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak, berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN

A. Statistik Deskriptif

Berikut ini merupakan tabel statistik deskriptif hasil pengolahan data SPSS 17.0:

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Efisiensi	70	.93	10.98	1.1975	1.18649
Size	70	11.03	12.38	12.0425	.18827

Kemakmuran	70	10.06	11.85	11.0063	.23211
Ukuran legislative	70	25.00	50.00	44.8571	6.75511
Intergovernmental revenue	70	.50	7.35	.8174	.79366

B. Pengujian Asumsi Klasik

Berdasarkan pengolahan data menggunakan SPSS 17.0, data dalam penelitian ini telah terbebas dari uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Ket.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-.792	2.300		-.344	.733	
	Size	-.079	.218	-.146	-.364	.718	Ho ditolak
	Kemakmuran	.182	.064	.557	2.828	.008	
	Ukuran legislatif	-.002	.004	-.132	-.355	.735	Ho ditolak
	Intergovernmental revenue	.538	.252	.441	2.135	.041	
R ²						.294	
Adjusted R ²						.203	
F						3.228	
Prob (F-stat)						.025 ^a	

SIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pengujian data karakteristik pemerintah daerah yang terdiri dari ukuran (*size*) pemerintah daerah, kemakmuran (*wealth*), ukuran legislatif, dan *intergovernmental revenue* terhadap kinerja pemerintah daerah yang dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda menunjukkan hasil bahwa kemakmuran (*wealth*), dan *intergovernmental revenue*

berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Sedangkan ukuran (*size*) dan ukuran legislatif tidak berpengaruh.

B. SARAN

Hasil simpulan diatas menjadi dasar bagi peneliti untuk mengajukan saran bagi pemerintah daerah di Indonesia khususnya dan pemerintah pusat pada umumnya untuk dapat lebih meningkatkan kinerja keuangannya. Terdapatnya pengaruh ukuran (*size*) pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah diharapkan pemerintah daerah yang memiliki ukuran (*size*) yang besar untuk lebih mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah tersebut.

Ukuran pemda yang diukur menggunakan total pendapatan tidak berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa peran ukuran pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja Pemda kabupaten/kota belum dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Tidak berpengaruhnya ukuran daerah terhadap kinerja Pemda kabupaten/kota kemungkinan karena Pemda belum dapat mengelola dengan baik

Pemda dengan ukuran kemakmuran (*wealth*) atau kekayaan asli daerah (PAD) yang besar seharusnya memiliki nilai kinerja yang tinggi. Jika Pemda dengan ukuran dan PAD yang besar ternyata memiliki nilai yang rendah maka Pemda tersebut harus sadar dan mawas diri bahwa kinerjanya berarti lebih tidak baik dibanding Pemda dengan ukuran dan PAD yang memang lebih kecil. Pemda dengan ukuran dan PAD yang besar dituntut untuk lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan aset serta kekayaan yang dimilikinya demi pelayanan kepada masyarakat.

Ukuran legislatif atau dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penelitian ini dinyatakan tidak terpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini terlihat dengan masih buruknya pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah. Banyaknya anggota DPRD yang menjadi tersangka dalam kasus korupsi dan sedikitnya kehadiran anggota DPRD dalam menghadiri rapat diduga sebagai penyebab buruknya pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah.

Intergovernmental revenue diharapkan dengan adanya transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dapat digunakan dengan baik, salah satunya dengan memperbaiki infrastruktur yang ada sehingga

tercipta pembangunan dan berdampak pada kegiatan ekonomi di daerah tersebut sehingga meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy dan Jhon Andra Asmara. 2006. "Perilaku Oportunistik Legislatif dalam Penganggaran Daerah". *Simposium Nasional Akuntansi IX*.
- Ahmad, Irdam. (2011). *Regional Fiscal Independence In East Java Province Post Regional Autonomy. Economic Journal of Emerging Markets*.
- Azhar, Muhammad Karya Satya. 2008. *Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Setelah Otonomi Daerah*. Tesis. Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit UNDIP.
- Governmental Accounting Standart Board (1994). *Concepts Statements No.2, Service Efforts and Accomplishment Reporting (2000)*.
- Hadi, Abdul, Hendri, Sapto, dan Inapty, Biana Adha. 2009. *Analisa Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*. Penelitian keuangan akuntansi sektor publik II Badan Litbang Departemen dalam Negeri, Bidakara, 2-3 Juni 2009.
- Halachmi, Arie. 2005. *Performance measurement is only one way of managing performance*. *International Journal of Productivity and Performance Management*. Vol. 54: 502-516.
- Hamzah, Ardi 2007, *Pengaruh Belanja dan Pendapatan terhadap pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan dan Pengangguran*, Konferensi Penelitian, Jatim.
- Kusumawardani, Media. 2012. 'Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia'. *Accounting Analysis Journal 1*. Universitas Negeri Semarang.

Legina, Matra. 2008. *Pengaruh Prinsip Good Governance dan Komitmen Organisasi dan Dimediasi oleh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Sektor Publik. Skripsi*. Riau : FE Universitas Riau.

Lesmana, Sigit I. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia*. Thesis. Surakarta : FE UNS.

Liestiani, A. 2008. *Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006*. Skripsi. Depok : FE UI.

Mandell, Lee M. 1997. *Performance Measurements and Management Tools in North Carolina Local Government*. Public Administration Quarterly; Spring 1997; Vol. 21: 96.

Mankiw, N. Gregory. 2006. *Principles of Economics*. Jakarta: Salemba Empat

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta.

Mustikarini, Widya Astuti., Fitriarsi, Debby. 2012. 'Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007'. *Simposium Nasional Akuntansi XV*: Banjarmasin.

Nam, Chang Woon dan Parsche, Rüdiger. *Looking For Appropriate Forms of intergovernmental Transfers For Municipalities in Transition Economics*. CESifo Working Paper.

Nasser, Abdul Hasibuan. 2009. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Ekonomi Makro Terhadap Return Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia*. Tesis Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara

Patrick, P. A. 2007. *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Unpublished Ph.D Dissertation*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- Puspita, Rora., Murtani, Dwi. 2012. *Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi Dalam Website Pemda*. Jurnal Simposium Nasional Akuntansi XV.
- Puspita, Rora. (2010). *Pengaruh Kinerja, Ketergantungan, dan Karakteristik Pemda Terhadap Tingkat Pengungkapan Sukarela Pada Situs PemdaTahun 2010*. Skripsi Sarjana. FEUI: Depok.
- Puspita Sari, Noni dan Idhar Yahya. 2009. *Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Langsung*. Universitas Sumatera Utara: Medan.
- Rustiono, Deddy. (2008). *Analisis Pengaruh Investasi , Tenaga Kerja, Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Jawa Tengah*. Tesis S2. USU: Medan.
- Sekaran, Uma dan Bougie, Roger. 2010. *Research Methods for Business-A Skill Building Approach-5th Edition*. United Kingdom: John Wiley&Sons Ltd.
- Suhardjanto, Djoko., Rusmin, Mandasari., Putriesti., dan Brown, Alistair. 2010. 'Mandatory Disclosure Compliance and Local Government Characteristics: Evidence From Indonesian Municipalities'. *Journal Public Policy January 2010*.
- Suhardjanto, Djoko., Yulianingtyas, Rena Rukmita. 2011. 'Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Kabupaten/Kota di Indonesia). *Jurnal Akuntansi & Auditing. Volume 8/No.1/November 20011: 1-194*.
- Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Skripsi. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Wood, L. 1998. *Local Government Dollars & Sense* (Rancho Palos Verdes, CA.: Training Shoppe).
- Zelda, Retina. (2008). *Tingkat Kepatuhan Pemda/Kota Di Indonesia Terhadap PP No 24 Tahun 2005 Dan Hubungannya Dengan Pendapatan Asli Daerah Dan Total Aktiva*. Skripsi Sarjana. FEUI. Depok.
- _____. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah.*